

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu negara, tentunya terdapat kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Israel. Dalam proses kepentingan nasional Israel di negara-negara Arab dan non-Arab, erat kaitannya dengan tujuan utama kebijakan luar negeri Israel. Kebijakan luar negeri Israel memiliki tiga tujuan utama (Satrio, 2011):

1. Tujuan pertama dan terpenting adalah untuk meningkatkan kebijakan luar negeri dan keamanan Israel, atau keamanan nasional. Pedoman ini memiliki beberapa elemen untuk mencapainya
2. Tujuan kedua adalah untuk membangun, memelihara dan mengembangkan hubungan damai tidak hanya dengan negara-negara Arab, Timur Tengah, Afrika dan negara-negara tetangga, tetapi dengan seluruh dunia Arab. Hal ini tentunya akan memperkuat keamanan Israel, membebaskan Israel dari isolasi geografis kawasan, dan mendorong perdagangan dan pertukaran lainnya dengan negara tetangga
3. Tujuan yang terakhir yaitu untuk melindungi minoritas Yahudi yang berada dimana saja dan menjaga hubungan mereka dengan Israel sebagai satu-satunya negara Yahudi.

Berlandaskan 3 tujuan utama politik luar negeri Israel, usaha Israel dalam membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab terus ditingkatkan. Sehingga tujuan politik luar negeri Israel keseluruhan tercapai.

Pada tahun 2009, Israel mulai melakukan misi diplomatik tersembunyi dengan Bahrain. Diketahui Israel membangun kantor Kedutaan Besar di Bahrain, kantor tersebut diisi oleh diplomat Israel yang bertugas dengan kedok

perusahaan yang disebut “Pusat Pembangunan Internasional” (CNN, 2020). Misi diplomatik tersembunyi ini dijalankan Israel selama lebih dari satu dasawarsa sampai dengan tahun 2020. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada tanggal 13 Agustus 2020, mengumumkan kesepakatan yang disebut dengan “Perjanjian Abraham” (*Abraham Accord*). Isi perjanjian tersebut adalah perjanjian damai untuk menormalkan hubungan antara Israel dan Bahrain. Perjanjian ini ditandatangani oleh Bahrain yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, Israel yang diwakili oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyani di Gedung Putih pada 15 September 2020. UEA dan Bahrain adalah negara Arab ketiga dan keempat yang membuka hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel (Wicaksono, 2020).

Dalam perjanjian Abraham ini, Israel dan Bahrain secara resmi akan menjalin persahabatan dan kerja sama untuk mencapai kawasan Timur Tengah yang sejahtera, aman, dan stabil untuk kepentingan semua negara dan masyarakat di Timur Tengah. Normalisasi hubungan ini dibantu oleh inisiatif dari Presiden Donald J. Trump. Berdasarkan publikasi resmi dari gedung putih, kesepakatan ini menunjukkan keberhasilan dari Amerika Serikat dalam upaya untuk mempromosikan stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Israel dan Bahrain percaya dengan adanya perkembangan hubungan diplomatik ini akan membantu menciptakan masa depan di mana semua orang dari beragam agama dapat hidup berdampingan secara damai dan kemakmuran di mana negara-negara berfokus pada kepentingan bersama dan membangun masa depan yang lebih baik. Sebelumnya, negara-negara Arab selama puluhan tahun tampak konsisten dengan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina yang memiliki konflik wilayah dengan Israel. Selain itu, dari awal kemerdekaan Israel telah terjadi peperangan antara negara-negara Arab dengan Israel sebagai bentuk penolakan atas kemerdekaan Israel. Peperangan yang

terjadi antara lain terdiri dari perang Arab-Israel tahun 1948, perang krisis Terusan Suez (1956), perang Enam Hari (1967) dan terakhir yaitu perang Yom Kippur pada tahun 1973 (Adhim, 2020).

Normalisasi hubungan pertama dari negara Arab dengan Israel dilakukan oleh Mesir pada tahun 1979, meski sebelumnya Mesir pernah terlibat perang Arab Israel (1948) dan perang Yom Kippur (1973). Liga Arab merespon perdamaian Mesir dan Israel dengan mengucilkan Mesir dan memindahkan pusat KTT Liga Arab dari Kairo. Kemudian pada tahun 1994, Yordania menandatangani perjanjian damai dengan Israel, meskipun sebelumnya Yordania pernah terlibat dalam Perang 6 Hari melawan Israel pada tahun 1967 (Rimapradesi & Sahide, 2021).

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini bermaksud memaparkan bagaimana strategi Israel kepada Bahrain yang pada awalnya tidak memiliki hubungan bilateral bahkan dari Bahrain sendiri merupakan salah satu negara Arab yang menentang Israel yang melakukan ekspansi wilayah Palestina, lalu hubungan tersebut berubah menjadi hubungan bilateral resmi antar kedua negara pada tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Penjelasan dari permasalahan tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana strategi diplomasi Israel untuk mendapatkan pengakuan bilateral resmi dari Bahrain pada tahun 2009-2020?”

C. Kerangka Pemikiran

Dalam proses penulisan skripsi ini sebagai landasan dasar, penulis mengutip perspektif, dan pernyataan para pakar ataupun otoritas tertentu yang memiliki wewenang serta pemahaman yang komprehensif dalam permasalahan yang terjadi yang dapat dijadikan landasan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Strategi Diplomasi Israel untuk Mendapatkan Pengakuan Politik Bilateral Resmi dari Bahrain Pada Tahun 2009-2020”**. Penulisan skripsi ini akan menggunakan teori realisme.

Teori Realisme

Dalam menjelaskan perilaku aktor pada isu Israel dan Bahrain, akan digunakan pendekatan Teori Realisme yang memiliki pendapat bahwasannya negara akan selalu terlibat pada suatu perebutan kekuasaan, hal ini merupakan hasil dari keinginan agar bisa bertahan dan bisa mendominasi negara lain. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan hal terpenting bagi negara. Apabila membahas mengenai politik internasional, maka kita membicarakan mengenai kekuasaan, dimana setiap negara berjuang untuk mendapatkan kekuasaan (Morgenthau & Thompson, 2010). Definisi yang dibawa oleh Hans. J Morgenthau mengenai teori realisme bahwa kepentingan (*interest*) sebagai konteks perebutan kekuasaan (*struggle for power*). Menurutnya, setiap tindakan suatu negara didalamnya selalu didasari oleh “kepentingan nasional” (*national interest*) yang diraih dengan berbagai cara, bisa dengan cara berdialog maupun dengan perang sekalipun (Morgenthau, 1978, p. 4-5).

Ditambahkan lagi bahwasannya Scott Burchill dalam bukunya berjudul *“The National Interest in International Relations Theory”*, mendefinisikan kekuasaan sebagai kekuatan ekonomi, militer, dan, politik namun hal ini tidak selamanya akan sama dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu (Burchill, 2005, p.36). Berdasarkan pandangan Burchill sebelumnya, dapat kita lihat bahwa suatu negara akan terus termotivasi untuk menjadi kekuatan terbesar, yang mana pada

akhirnya dapat memungkinkan bagi mereka untuk mendominasi negara lain. Konsep pemenuhan kepentingan ini erat kaitannya dengan tindakan negara dalam mengejar *power*. Hal ini kemudian akan menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara (Yusrina, 2019).

Antara *national interest* dan *power* memiliki hubungan, dimana hubungan ini telah dijelaskan oleh Morgenthau dalam “6 prinsip-prinsip realisme politik” yang disampaikan dalam bukunya “*Politics among Nations*”. Hubungan antara *national interest* dan *power* dijelaskan tepatnya pada prinsip kedua yang menyatakan bahwa “cara utama yang bisa membantu realisme politik melewati politik internasional adalah konsep *interest* yang didefinisikan sebagai suatu *power*”. Dalam diplomasi, *power* merupakan konsep penting yang ada didalamnya. Oleh karena itu, negara-negara dalam mencapai kepentingannya sangat memerlukan *power* (Morgenthau, 1978, p.13-14). Menurut Morgenthau, *power* yaitu “*mans’ control over the minds and actions of other men*”, yang dapat diartikan bahwa *power* merupakan kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan perilaku orang lain. Dengan kata lain, *power* adalah kemampuan untuk membuat suatu aktor tunduk dan menuruti kemauan aktor lainnya (Yusrina, 2019).

Menurut Joseph S. Nye, *power* dibagi menjadi *hard power* dan *soft power*. *Hard power* lebih dikenal dengan adanya perintah dan paksaan dari suatu pihak ke pihak lain, agar pihak pertama mendapatkan hasil yang diinginkannya. Sedangkan *soft power* sendiri, didefinisikan oleh Joseph S. Nye sebagai suatu cara untuk memikat pihak lain dengan ‘menebarkan pesona’ yang dimiliki, sehingga kita dapat membuat orang lain membenarkan pandangan kita dan akhirnya setuju dengan pendapat kita tanpa menggunakan paksaan ataupun perintah (Nye, 2004). Pendekatan *soft power* lebih berkarakter inspirasional yaitu kekuatan menarik orang lain dengan kekuatan kecerdasan emosional seperti membangun hubungan atau ikatan yang erat melalui karisma, komunikasi yang persuasif, daya tarik ideologi visioner, serta pengaruh budaya, sehingga membuat orang lain terpengaruh (Nye, 2008).

Sebagai aktor hubungan internasional, Israel menggunakan *power* untuk mengontrol tindakan aktor lain agar berjalan sesuai dengan kepentingan nasional yang ingin Israel capai. Untuk meraih tujuan politik luar negerinya, Israel menggunakan *soft power* untuk ‘membujuk’ Bahrain agar mau menjalin hubungan resmi dengan negaranya. Karena seperti yang diketahui, bahwasannya Bahrain merupakan salah satu dari negara-negara yang menentang Israel dan menolak untuk melakukan kerja sama antar negara dengan Israel sebagai bentuk dukungan kepada Palestina.

Perwujudan *soft power* Israel kepada Bahrain yaitu penawaran kerja sama melalui diplomasi publik dan diplomasi *government to government* pada sektor keamanan dan pertahanan serta perekonomian. Israel melihat adanya peluang pada negara Bahrain yang merupakan negara kecil di Timur Tengah. Sebagai negara kecil, Bahrain rentan oleh ancaman, baik dari internal maupun eksternal. Di sektor ekonomi, Bahrain mengalami pelemahan karena adanya utang negara yang besar serta pada tahun-tahun terakhir Bahrain telah mengeluarkan dana besar untuk melakukan penumpasan protes rakyatnya yang menuntut pemberantasan korupsi dan demokrasi.

D. Hipotesa

Strategi Israel untuk mendapatkan pengakuan politik bilateral resmi dari Bahrain adalah menggunakan jalur:

- a. Diplomasi publik pada sektor perekonomian
- b. Diplomasi *government to government* melalui sektor keamanan dan pertahanan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode deskriptif, yang merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu masalah atau fenomena yang menjadi topik kajian utama berdasarkan temuan data lapangan dan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan memprioritaskan keluasan topik melalui aspek analisis data (Nursalam, 2008).

2. Sumber Data

Data-data yang akan digunakan penulis yaitu data tertulis (data sekunder) seperti, terdapat pada buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data-data melalui perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, website dan bahan-bahan lain sesuai dengan topik yang akan diteliti dan dapat diuji kebenarannya (Mantra, 2004).

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menjelaskan strategi yang digunakan Israel untuk mendapatkan pengakuan politik bilateral resmi dari Bahrain, penulis memberikan batasan waktu penelitian yakni dimulai pada awal masuknya Israel ke Bahrain dengan misi diplomatik tersembunyi di tahun 2009 sampai dengan disahkannya hubungan bilateral antara Israel dan Bahrain pada 15 September 2020 di Gedung Putih Amerika Serikat. Ini dimaksudkan agar pembahasan tidak keluar dari topik utama dan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan

G. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan Israel dalam meraih pengakuan resmi hubungan bilateral dengan Bahrain.
2. Sebagai sarana pembuktian penulis dalam mempraktikkan ilmu-ilmu yang didapat selama proses perkuliahan melalui aplikasi teori dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pelaksanaan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang diantaranya terdiri dari lima bab pembahasan, di mana masing-masing bab terdiri dari sub-pokok bahasan di dalamnya.

BAB I : Bab satu berisi tentang pendahuluan. Bab ini memuat serta menguraikan diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas mengenai tahapan Israel untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan sebagai suatu negara di mata Internasional baik dari negara non-Arab maupun negara Arab.

BAB III : Membahas mengenai dinamika politik luar negeri Bahrain terhadap Israel sebelum pembukaan diplomatik.

BAB IV : Membahas mengenai strategi yang digunakan Israel untuk mendapatkan pengakuan bilateral resmi dari Bahrain. Baik diplomasi publik dibidang perekonomian maupun diplomasi formal di bidang keamanan dan pertahanan.

BAB V : Berisi penutup, yang berisi tentang kesimpulan atas jawaban pokok pada penelitian mengenai “Strategi Diplomasi Israel

untuk Mendapatkan Pengakuan Politik
Bilateral Resmi dari Bahrain Pada Tahun 2009-
2020”